

MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Rahman Syahputra¹, Adnan²

¹²Universitas Ibnu Sina, Indonesia

Corresponding Author: rahman@uis.ac.id

ARTICLE INFO

*Keywords: Manajemen
Pemerintah Daerah,
Pengelolaan Pasar
Tradisional, Optimalisasi Aset
Daerah*

Received: 1 April 2025

Revised: 20 April 2025

Accepted: 17 Mei 2025

©2024 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir yang kurang optimal sehingga mengakibatkan kondisi pasar tradisional yang ada semrawut dan terkesan kurang mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah. Selain itu, kondisi pasar yang demikian sangat mempengaruhi minat masyarakat untuk berkunjung ke pasar tradisional sehingga secara langsung sangat berdampak pada tingkat pendapatan pedagang dan juga berdampak kepada penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar yang saat ini belum berkontribusi secara maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis optimalisasi pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir. salah satunya yaitu dengan melihat bagaimana manajemen yang dilakukan oleh Pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan pasar tradisional. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Pemerintah dalam pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir. Studi ini didesain dengan menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif yang dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap data penelitian dapat diketahui bahwa manajemen pemerintahan daerah dalam optimalisasi pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir belum berjalan secara optimal disebabkan oleh proses perencanaan yang belum matang dan pelaksanaan pembangunan pasar tradisional yang tidak merata serta kapasitas beban yang melebihi kemampuan karena pelaksanaan hanya ditangani oleh satu bidang yang terbatas.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pengelolaan aset daerah merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pengelolaan aset yang baik maka pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam

mengelola aset aset. Dikeluarkannya peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, kemudian diturunkan dalam bentuk peraturan Menteri yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian (Dja'wa, 2023).

Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu daerah otonom yang berada di wilayah Provinsi Riau yang terus mengolah dan menggali potensi-potensi keuangan daerah agar dapat menerima Pendapatan Asli Daerah, yang salah satunya melalui Retribusi Daerah. Pengertian Retribusi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 1 angka 64 adalah Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan PAD seiring dengan meningkatnya kebutuhan daerah. Secara umum PAD Kabupaten Indragiri Hilir tidak mengalami peningkatan yang signifikan pada tiap tahunnya dan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal penerimaan PAD belum tercapai secara maksimal. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melakukan banyak pembenahan dan perbaikan terhadap pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini juga bertujuan untuk mempertahankan keberadaan pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Selain tujuan utama sebagai tempat proses kegiatan jual beli, diharapkan pula agar keberadaan pasar-pasar tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir dapat menjadi salah satu tujuan wisata yang menarik dan mampu memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Indragiri Hilir.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar sebagai Pendapatan Asli Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, maka dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir. Namun sejauh ini regulasi tersebut belum memberikan kontribusi yang baik dalam pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengelola pasar tradisional sehingga masih kurang efisiennya penerimaan retribusi pelayanan pasar yang bersumber dari obyek retribusi. Selain itu, tidak adanya Badan ataupun Instansi yang secara khusus mengurus retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Indragiri Hilir membuat pelayanan pada wajib retribusi dan pemantapan kegiatan pengelolaan pasar belum terwujud, padahal hal ini sangat penting demi terwujudnya peningkatan pelayanan pasar dan pengelolaan pasar yang maksimal. Dengan demikian diharapkan agar pasar tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir dapat terpelihara ketertiban dan kebersihannya serta kegiatan pasar lebih kondusif.

Sampai dengan tahun 2022 ini, dari 13 (tiga belas) pasar tradisional yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, baru 6 (enam) pasar saja yang telah terealisasi pembangunan dan perbaikannya yaitu Pasar Kayu Jati (Pasar Umbut Kelapa) Tembilahan, Pasar Mayang Kelapa Tembilahan, Pasar Pagi PJ Tembilahan, Pasar Kelapa Gading Tembilahan, Pasar Kuala Enok dan Pasar Bertingkat Guntung. Untuk Pasar Pagi PJ dan Pasar Mayang Kelapa Tembilahan sendiri hingga saat ini masih belum ditempati secara keseluruhan oleh pedagang sehingga hanya beberapa kios saja yang baru ditempati. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya

sarana pendukung bagi pedagang untuk berjualan. Sementara itu untuk pembangunan Pasar Bertingkat Guntung yang dibangun sejak tahun 2011 lalu hingga saat ini pembangunannya belum rampung 100%. Oleh karena itu, perlu adanya manajemen dan evaluasi dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan pasar tradisional agar pemungutan retribusi pelayanan pasar dapat berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 1: Pasar Tradisional yang Dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Sumber: *Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir, 2023.*

No.	Nama Pasar	Lokasi	Jumlah Pedagang
1.	Pasar Terapung Tembilahan	Jl. Yos Sudarso	829
2.	Pasar Mayang Kelapa Tembilahan	Jl. Baharuddin Yusuf	214
3.	Pasar Dayang Suri Tembilahan	Jl. Sudirman	172
4.	Pasar Yayasan Al-Huda Tembilahan	Jl. Sudirman	128
5.	Pasar PJ Pasar Pagi Tembilahan	Jl. Baharuddin Yusuf	204
6.	Pasar Kelapa Gading Tembilahan	Jl. Soebrantas	140
7.	Pasar Umbut Kelapa Tembilahan Hulu	Jl. Kayu Jati Tembilahan Hulu	152
8.	Pasar Sungai Salak	Kecamatan Tempuling	160
9.	Pasar Guntung	Kecamatan Kateman	147
10.	Pasar Bertingkat Guntung	Kecamatan Kateman	-
11.	Pasar Enok	Kecamatan Enok	10
12.	Pasar Kemuning	Kecamatan Kemuning	88
13.	Pasar Kuala Enok	Kecamatan Tanah Merah	-

Permasalahan

Berdasarkan uraian yang menjadi latar belakang penulisan ini, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Manajemen Pemerintahan Daerah dalam Optimalisasi Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apa Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir?

Tujuan Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk memahami lebih dalam mengenai manajemen Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan pengelolaan pasar tradisional, apakah telah berjalan secara optimal dan sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis optimalisasi pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah dalam pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder dalam menganalisis permasalahan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian wawancara (*interview research*).

Dari penelitian ini penulis memperoleh data mengenai sejarah objek penelitian, struktur organisasi, kegiatan objek penelitian dan data lain yang berhubungan dengan penulisan ini. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang mengkaji tentang peran Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam Optimalisasi Pengelolaan Pasar Tradisional. Penulis berusaha melakukan analisis atas semua data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, dengan menggunakan metode pendekatan analisis deskriptif kualitatif, teknis yang digunakan adalah dengan uraian-uraian (deskripsi) terhadap permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai berkembangnya dunia telah membawa perubahan pada pola hidup manusia terlebih pada kebutuhan masyarakat. Dengan bertambahnya jumlah penduduk akan berpengaruh pada jumlah sarana perekonomian bangsa. Terlebih dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga/keluarga untuk terpenuhinya akan keperluan kebutuhan masyarakat pasar merupakan sarana/tempat sebagai salah satu fasilitas untuk bertemunya penjual dan pembeli. Bagi masyarakat pasar merupakan tempat/wadah untuk para bertemunya antara manusia dengan manusia lainnya. Pasar tradisional mempunyai peran penting dalam memajukan pertumbuhan perekonomian di negara kita. Keberadaan pasar tradisional bagi masyarakat sangat diperlukan masyarakat khususnya bagi masyarakat daerah/pinggiran dalam kegiatan berdagang, karena didalam pasar tradisional harga juga lebih murah dan terjangkau bagi masyarakat dibanding belanja di mal/swalayan (Angkasawati & Devi Milasari, 2021).

Kondisi sebagian pasar tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir yang masih mengkhawatirkan dan jauh dari kata nyaman seakan terkesan bahwa tidak mendapat perhatian dari Pemerintah. Kondisi tersebut tentu saja menimbulkan dampak yang kurang baik bagi masyarakat sebagai pedagang pasar maupun pembeli. Selain itu, keberadaan pasar tradisional yang berada di tengah kota telah menyebabkan ketimpangan pertumbuhan pembangunan ekonomi yaitu masih terpusatnya kegiatan perekonomian di pusat kota. Kondisi ini selain menimbulkan ketidakmerataan hasil pembangunan, juga mengakibatkan menumpuknya arus orang dan barang ke pusat kota yang pada akhirnya menimbulkan dampak seperti kemacetan lalu lintas dan pencemaran lingkungan. Hal ini kemudian menjadi salah satu dasar dari perumusan kebijakan perdagangan. Atas dasar itu, dalam RTRW Kabupaten Indragiri Hilir telah direncanakan untuk merelokasi pasar dari pusat kota ke daerah pinggiran dan membangun pasar-pasar di setiap kecamatan dalam rangka untuk mengoptimalkan pengembangan pasar tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir.

Perencanaan dan Pengorganisasian dalam Optimalisasi Pengelolaan Pasar Tradisional

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses menetapkan tujuan dan memutuskan hal tersebut dapat dicapai (Wardani, 2024). Perencanaan meliputi sumber-sumber yang dibutuhkan, tugas yang diselesaikan, tindakan yang diambil dan jadwal yang diikuti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir maka perlu adanya perumusan perencanaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Perencanaan memegang peranan penting dalam upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam suatu organisasi.

Perencanaan harus diawali dengan pertanyaan yang bermakna atau mengidentifikasi permasalahan signifikan yang dihadapi, dan harus dapat merumuskan masalah atau

pertanyaan tersebut dengan cara yang memungkinkan untuk dijawab atau ditindaklanjuti dengan program/ kegiatan yang tepat. Setiap upaya untuk mendapatkan pengetahuan (dan solusi) harus dimulai dari sini (Saifuddin, 2022).

Pada praktiknya, di daerah sering terjadi penggaran sesuatu yang tidak dibutuhkan, sedangkan yang dibutuhkan tidak dianggarkan (Yadisar, 2023). Hal ini bisa terjadi karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu ketika penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Perencanaan yang dilakukan harus memperhatikan tiga hal, yaitu melihat kondisi aset daerah di masa lalu, aset yang dibutuhkan dimasa sekarang, dan perencanaan kebutuhan aset di masa yang akan datang (Manane et al., 2023).

Adapun perencanaan yang akan dirumuskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir seperti dalam pembahasan sebagai berikut:

Penentuan Target

Target pembangunan merupakan tolak ukur realisasi pengelolaan pasar tradisional oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir. Yang dimaksud disini adalah tahapan-tahapan atau proses penentuan target pembangunan yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran.

Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyusun target pembangunan pasar tradisional dengan cara turun langsung ke pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir untuk melakukan uji petik potensi-potensi yang ada di pasar tradisional setiap tahunnya, dengan maksud untuk melakukan pendataan ulang setiap potensi yang ada di setiap pasar tradisional seperti jumlah pedagang yang masih aktif berdagang maupun jumlah penggunaan tempat yang telah disediakan oleh pemerintah daerah karena setiap tahunnya jumlah pedagang yang masih aktif menggunakan tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah selalu mengalami perubahan. Dengan dilakukannya pendataan tersebut maka diharapkan terjadi peningkatan pedagang seiring peningkatan kualitas pasar tradisional setiap tahunnya.

Secara teknis, perencanaan pengembangan Pasar Tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang mana telah dijelaskan bahwa penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang mana dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Namun dalam kenyataannya, masalah penyediaan fasilitas pasar bagi pedagang hingga saat ini masih menjadi satu persoalan yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah.

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa perencanaan dalam hal penentuan target senantiasa mengacu kepada pendataan pedagang dan jumlah penggunaan tempat berjualan yang tidak menentu jumlahnya setiap tahun dan melihat semua potensi-potensi yang ada pada pasar tradisional yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir termasuk dalam hal penerimaan retribusi pelayanan pasar kabupaten Indragiri Hilir.

Struktur Organisasi

Pengorganisasian yang dimaksud disini adalah bagaimana sumber daya manusia dalam memegang peranan penting dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Dalam hal ini, kualitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya seharusnya harus mampu

menguasai apa yang dikerjakannya agar tujuan dari pelaksanaan tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas.

Pada semestinya dalam suatu organisasi jumlah pegawai harus seimbang dengan jumlah pekerjaan dalam organisasi tersebut dengan maksud bahwa jumlah pegawai tidak kurang ataupun tidak berlebihan agar tidak terjadi pemborosan dan kekurangan sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik.

Sumber daya organisasi dalam upaya pencapaian optimalisasi kinerja pada pengelolaan aset daerah terbagi menjadi dua, yaitu Teknis dan Manusia (Sholly Salam Sitompul et al., 2021). Hasil Wawancara dengan Bapak Suhadi, selaku Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir, “Secara umum pengorganisasian bisa dikatakan sedang. Karena untuk yang di tingkat kecamatan masih kekurangan SDM serta sarana dan prasarana penunjang dalam pengelolaan aset/ pasar.”

Dalam pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah Daerah juga diharuskan agar menjalankan prinsip manajemen yang baik dengan melakukan pengorganisasian yang tepat dalam suatu kebijakan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik serta dapat tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pasar di Kabupaten Indragiri Hilir, dalam pelaksanaannya telah membentuk strukturisasi pegawai yang sesuai dengan tugas serta fungsinya masing-masing. Dalam hal mengurus pasar maka pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir secara khusus ditangani oleh Bidang Pasar.

Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Tradisional

Dalam pelaksanaan pembangunan pasar tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dengan tujuan untuk menciptakan kelancaran pembangunan dan tercapainya target yang diinginkan. Dalam pembangunan Pasar Umbut Kelapa di Kecamatan Tembilahan Hulu pada tahun 2014 lalu yang menggunakan dana sebesar 5,6 Miliar tersebut merupakan pembangunan yang mana selain pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten Indragiri Hilir juga bersumber dari bantuan Pemerintah Provinsi Riau sebesar 1,2 Miliar yang berasal dari APBD Riau dan DAK APBN.

Selain dari pada itu, dalam pembangunan dan pembenahan Pasar Tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir juga mendapatkan bantuan dari beberapa perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Indragiri Hilir dalam bentuk dana CSR (*Corporate Social Responsibility*). Terhitung ada sebanyak lima perusahaan perkebunan dan kehutanan yang mendonasikan bantuan dalam upaya menyelesaikan beberapa permasalahan dalam pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir melalui program CSR tersebut.

Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Pasar

Sebagai bentuk konkrit dari upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir untuk menjaga ketentraman dan ketertiban pasar, melalui seksi ketertiban dan penyuluhan Bidang Pasar telah menyiapkan 6 petugas trantib yang kemudian ditempatkan di setiap Pasar Tradisional yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

Pengawasan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Tradisional

Demi terwujudnya tujuan dalam pelaksanaan pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir, maka tentu harus adanya pengawasan yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini jelas perlu dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan Pasar Tradisional agar sesuai dengan hasil yang diharapkan. Pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan aset perlu dirancang dan dilakukan sejak tahap perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset (Manane et al., 2023). Dalam hal ini peran serta masyarakat dan Pemerintah serta auditor internal sangat penting untuk menjaga aset daerah tetap dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan tidak disalahgunakan.

Salah satu bentuk pengawasan dalam pengelolaan Pasar Tradisional yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir adalah dengan melakukan pengawasan langsung atau dengan inspeksi mendadak terhadap pasar tradisional yang ada. Hal ini bertujuan agar Pemerintah Daerah dapat langsung melihat kondisi pasar dan pedagang baik dari segi ketertiban maupun keadaan harga barang.

Kendala yang Dihadapi dalam Pengelolaan Pasar Tradisional

1. Anggaran Pembangunan Pasar Tradisional

Komponen yang sangat penting dalam jalannya roda pemerintahan adalah adanya sistem keuangan yang dikelola secara tertib sehingga menghasilkan kesejahteraan masyarakat yang diharapkan. Olehnya itu keuangan negara sangat diharapkan untuk dapat dikelola secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mohi, 2020).

Masih minimnya dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pelaksanaan pembangunan beberapa Pasar Tradisional yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan Pasar Tradisional yang optimal. Hal ini dapat dilihat pada pembangunan Pasar Tradisional Guntung yang berada di Kecamatan Kateman yang mana pembangunannya telah dilakukan sejak tahun 2011 lalu namun hingga saat ini masih belum terselesaikan. Hal lain terjadi pada pembangunan Pasar Tradisional Mayang Kelapa yang dibangun pada tahun 2013 lalu dimana pelaksanaan pembangunan yang terhambat pada pendanaan sehingga proses pembangunan pasar sempat terhenti. Kendatipun pasar ini telah beroperasi, namun pada kenyataannya masih meninggalkan persoalan dimana belum tersedianya fasilitas yang dibutuhkan oleh pedagang pada sebagian los dan kios. Untuk merealisasikan kebutuhan pedagang tersebut selanjutnya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir kembali menyiapkan anggaran pada periode selanjutnya.

Permasalahan yang sering terjadi di pemerintah daerah adalah belum diterapkannya secara benar aturan pengelolaan barang milik daerah yang berakibat pada proses perencanaan penganggaran pengadaan barang yang tidak sesuai dengan peruntukannya, penggunaan barang milik daerah yang tidak sesuai penetapan penggunaan, kemudian pemerintah daerah tidak melakukan kapitalisasi terhadap biaya-biaya yang menambah harga perolehan aset tetap. Barang-barang yang dibiarkan dan tidak terpelihara diambil alih oleh pihak lain bahkan aset tetap/BMD tidak dapat ditelusuri keberadaannya serta kehilangan aset tetap tidak terdeteksi. Barang yang tidak dikembalikan ke SKPD oleh pejabat yang telah pensiun, dan ada juga aset warisan daerah Kabupaten induk yang diserahkan kepada daerah yang dimekarkan tidak didukung dengan rincian data yang informatif dan tidak disertai bukti kepemilikan (Syahputra et al., 2019).

Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu

mulai tanggal 1 Januari 2001. Adanya otonomi daerah, daerah dipacu untuk lebih berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah (Sudarmana & Sudiartha, 2020).

2. Penerapan Sistem Organisasi yang Belum Memadai

Dalam pelaksanaan pengelolaan Pasar Tradisional yang begitu rumit, jelas tidak akan optimal ketika penanganan permasalahan pada Pasar Tradisional hanya ditangani oleh satu instansi yang tidak secara khusus menanani Pasar. Dalam hal ini di Kabupaten Indragiri Hilir permasalahan pengelolaan pasar hanya ditangani oleh satu bidang yang merupakan bagian dari struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dianggap belum mampu menangani permasalahan pengelolaan Pasar Tradisional secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan personil Bidang Pasar yang bertugas dalam penanganan pasar masih sangat minim sehingga masih kerap menyebabkan keterhambatan dalam pelaksanaan pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir.

Pemahaman tentang aktivitas pengelolaan Pasar Tradisional mutlak harus dimiliki oleh aparatur dinas yang benar-benar membidangi dan fokus dalam pengelolaan pasar hingga dalam pelaksanaannya para aparatur pelaksana lebih memahami hal-hal yang mendasar tentang pengelolaan Pasar Tradisional. Untuk itu, sudah sewajarnya jika pelaksanaan pengelolaan pasar di Kabupaten Indragiri Hilir ditangani oleh satu instansi khusus yaitu Dinas Pasar.

3. Pasar Tradisional Lebih sebagai Penghasil Pendapatan Asli Daerah

Kepedulian Pemerintah Daerah terhadap Pasar Tradisional menentukan arah kebijakan dan bentuk organisasi dari instansi yang membidangi Pasar Tradisional di Daerah. Di Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah meletakkan posisi Pasar Tradisional semata-mata sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi yang dipungut dari para pedagang daripada penekanan pada pengelolaan pasar termasuk di dalamnya pembinaan pedagang. Hal ini menyebabkan sebagian besar Pasar Tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir dalam kondisi yang semrawut karena kurang baiknya manajemen dalam pengelolaan pasar.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan Pasar Tradisional dapat dikatakan lebih kepada perbaikan fisik bangunan pasar saja tanpa disertai dengan pembangunan kelembagaan seperti pengembangan organisasi pengelola pasar tradisional, termasuk di dalamnya pengembangan sistem manajemen pasar beserta Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam pengelolaan pasar.

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, setelah dilakukannya renovasi atau pembangunan kembali bangunan pasar selama kurun waktu 2-3 tahun kemudian bangunan pasar beserta pengelolaan pasarnya tampak kembali mengalami kesemrawutan dengan kondisi pasar yang kembali kumuh dan kotor sama keadaannya sebelum dilakukan renovasi. Hal ini tambah diperparah dengan tidak adanya kegiatan perawatan dan pemeliharaan pasar yang dilakukan Pemerintah dengan alasan keterbatasan anggaran daerah. Hal ini terjadi karena kebijakan pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir hanya sebatas menyentuh pada pembangunan fisik pasar yang tidak diikuti dengan aktivitas perawatan dan pemeliharaan pasar.

4. Program Pemerintah yang Kurang Maksimal dalam Pengelolaan Pasar Tradisional.

Salah satu masalah utama pengelolaan aset di daerah adalah aset harus dilakukan dalam suatu program yang dapat dipertanggung-jawabkan. Program tersebut harus menggambarkan komitmen pemerintah daerah untuk menjamin pemerintahan yang baik (*good governance*),

serta mengacu pada asas-asas keterbukaan, keadilan, dapat dipertanggungjawabkan dan mengutamakan kepentingan publik. Ini semua akan mendorong pemerintah daerah untuk benar-benar mengembangkan strategi pembangunan daerah berdasarkan potensi yang dimilikinya sendiri (Noviawati, 2016).

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil atas analisis terhadap manajemen Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir adalah masih belum berjalan secara optimal dan belum memberi kontribusi yang maksimal bagi pendapatan asli daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Perencanaan yang belum matang menyebabkan proses pelaksanaan pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir tidak berjalan optimal. Selain itu, sistem pengorganisasian yang kurang optimal karena kapasitas beban melebihi kemampuan dari Pemerintah Daerah sebagai pihak pelaksana. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pengelolaan pasar tradisional yang ditangani oleh tingkatan Bidang saja dalam hal ini ditangani oleh Bidang Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sejauh ini belum cukup mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi pada Pasar Tradisional. Minimnya aparatur pengelola serta kurangnya pemahaman dalam bidang manajemen pasar menyebabkan tidak terlaksananya pengelolaan Pasar Tradisional yang baik.

Kurangnya pengawasan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pelaksanaan pengelolaan Pasar Tradisional mengakibatkan proses pembangunan yang terkesan lambat sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak dapat dirasakan secara maksimal. Tidak adanya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur Pasar Tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir menyebabkan tidak terlaksananya manajemen yang baik dalam pengelolaan pasar tradisional sehingga kurang optimalnya pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir.

SARAN

Didasari pada keadaan yang dipaparkan di atas, maka adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

1. Dalam upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan Pemerintah melakukan perencanaan yang matang dan dengan memprediksikan kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang. Hal tersebut bertujuan agar pelaksanaan pembangunan pasar tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir terlaksana dengan baik dan dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan.
2. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pelaksanaan pengelolaan Pasar Tradisional membentuk SOTK baru yang khusus membidangi pasar agar lebih fokus dalam menangani persoalan Pasar sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan overlap dalam pengelolaan pasar di Kabupaten Indragiri hilir.
3. Kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir agar serius dalam pengelolaan Pasar Tradisional dengan menyiapkan anggaran khusus untuk pelaksanaan pengelolaan pasar di Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan anggaran yang cukup diharapkan agar pelaksanaan pembangunan Pasar Tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir dapat terealisasi dengan baik dan menciptakan pasar tradisional yang mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

4. Agar pelaksanaan pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir dapat optimal, maka harus disertai dengan adanya pengawasan langsung dari Pemerintah Daerah baik mengenai masalah pembangunan pasar, keadaan pedagang, serta hal-hal lain yang mendukung terciptanya pasar tradisional yang baik. Selain dari pada itu, perlu adanya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur Pasar Tradisional agar pelaksanaan pengelolaannya dapat berjalan teratur dan sesuai dengan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, I., Syaikat, Y., & Falatehan, A. F. (2019). Optimisasi Manajemen Aset Tetap Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance Di Pemerintah Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10(2), 1–17. https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v10i2.27783
- Ridwan Saifuddin. (2022). Kualitas Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*, 10(03), 309. <https://doi.org/10.35450/jip.v10i03.326>
- Angkasawati, & Devi Milasari. (2021). Pengembangan Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Minat Pengunjung Di Pasar Tradisional Boyolangu Kec. Boyolangu Tulungagung. *Publiciana*, 14(1), 169–187. <https://doi.org/10.36563/publiciana.v14i1.296>
- Dja'wa, A. (2023). Implementasi Pengelolaan Aset Daerah Pada Daerah Pemekaran. *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, 2(01), 661–671. <https://doi.org/10.62668/bharasumba.v2i01.497>
- Manane, D. R., Kase, M. S., Redjo, P. R. D., & Manek, A. (2023). MANAJEMEN PENGELOLAAN ASET DAERAH (Studi Kasus Kab. TTU). *Inspirasi Ekonomi : Jurnal Ekonomi Manajemen*, 5(4), 289–302. <https://doi.org/10.32938/ie.v5i4.5738>
- Mohi, W. K. (2020). *IMPLEMENTASI POAC FUNGSI MANAJEMEN PADA ADMINISTRASI KEUANGAN DI KANTOR KECAMATAN MARISA KABUPATEN POHUWATO. XVII(2)*.
- Noviawati, E. (2016). Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(1), 47. <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i1.410>
- Sholly Salam Sitompul, Sadu Wasistiono, & Fernandes Simangunsong. (2021). Manajemen Strategis Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Aset Tanah Dan Bangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. *VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 13(3), 607–620. <https://doi.org/10.54783/jv.v13i3.479>
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiarta, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p06>
- Syahputra, K., Syaikat, Y., & Irwanto, A. K. (2019). Strategi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 9(2), 1–14. https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v9i2.27636
- YADISAR, A. M. (2023). Manajemen Pengelolaan Aset Daerah. *FOKUS : Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 21(1). <https://doi.org/10.51826/fokus.v21i1.722>

